



HISTORIA VITAE

Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

Volume 29, No. 2, Oktober 2015

ISSN - 0215-8809

- ▣ **SOCIAL THEORIES OF POWER**
Joko Wicoyo
- ▣ **REAKTUALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH**
A. Kardiyat Wiharyanto
- ▣ **KU TITIPKAN BANGSA DAN NEGARA INI KEPADAMU: BERBAGAI KESAKSIAN TENTANG AKHIR HIDUP SUKARNO**
Brigida Intan Printina
- ▣ **KEMENANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2009 DI DAERAH PEMILIHAN I KABUPATENKLATEN**
Lambertus Dodik Prasetyo dan Sumini Theresia
- ▣ **GEREJA BATAK KARO PROTESTAN YOGYAKARTA 1969-2010: DARI SEBUAH KOMUNITAS MENJADI GEREJA UTUH**
Ali Mustofa dan Anton Haryono

Diterbitkan oleh :

Program Studi Pendidikan Sejarah – Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

E-mail: spps@staff.usd.ac.id

**KU TITIPKAN BANGSA DAN NEGARA INI
KEPADAMU: BERBAGAI KESAKSIAN TENTANG
AKHIR HIDUP SUKARNO**

Brigida Intan

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai kesaksian tentang akhir hidup Sukarno. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Sukarno menjadi “Bapak Bangsa” dan telah menitipkan negara ini untuk kita. Namun banyak yang bersaksi bahwa Sukarno wafat dengan penderitaan karena politik negara ini. Artikel ini membawa nilai moral supaya setiap orang dapat menghargai para pemimpin yang telah berjuang kepada negara sekalipun banyak kelemahan yang terjadi, namun mereka telah memperjuangkan negara untuk kesejahteraan di masa yang akan datang.

ABSTRACT

This article aims to describe the various testimonies about the end of life Sukarno . Writing results showed that Sukarno became "Father of the Nation" and the country has been entrusted to us . But many who testified that Sukarno died in agony because of this country's politics . This article brings moral values so that everyone can appreciate leaders who have fought to the state even though many of the weaknesses that occur , but they have been fighting for the welfare state in the future.

Keywords: kesaksian, wafat, Sukarno

PENDAHULUAN

Ketika proklamasi dikumandangkan, bangsa Indonesia seluruhnya gegap gempita menyambut kemerdekaan. Apalagi dalam naskah teks

Ku Titipkan Bangsa dan Negara ini (Brigida Intan)

proklamasi tertulis “Atas nama bangsa Indonesia”. Kalimat ini menandakan rakyatlah yang menang dan berkuasa. Inilah sistem demokrasi yang adil dan tidak ada ketimpangan di dalamnya. Namun apa yang terjadi pada bangsa di awal abad 21 ini sama seperti yang dikatakan oleh Winston Churchill dalam demokrasi modern, bahwa: “*Democracy is the worst forms of government except all other forms that have been tried from time to time*”. ”Memang demokrasi itu bentuk pemerintahan yang jelek, tetapi yang lebih tidak ada”.¹ Ini yang menimpa bangsa saat ini, untuk mencari jalan terbaik pun terdapat banyak gejolak dalam pelaksanaan pemerintahan.

Pelaksanaan pemerintahan yang demokratis sangat memerlukan loyalitas. Sukarno sempat dikenal sebagai pemimpin yang memiliki loyalitas tinggi, khususnya di mata para petinggi Negara dan masyarakat Indonesia karena keberanian dan perjuangannya bagi bangsa Indonesia. Namun, yang menimpa bangsa ini ialah krisis mental yang menimpa Negara ini. Tidak ada lagi etika dan keterbukaan. Bahkan satu masalah besar yang menambah sulit situasi negeri ini ialah praktek korupsi. Korupsi merupakan suatu masalah etika. Korupsi sudah menyangkut moral bangsa maupun moral pribadi yang melakukan tindakan tidak terpuji.²

Apakah para pendiri bangsa memimpin dengan dalil kepentingan pribadi? Dimanakah jiwa revolusioner pemimpin bangsa di abada 21 ini? Apakah keadilan masih ada? Sukarno sebagai Bapak bangsa mencoba memperjuangkan bangsa di atas tangannya, meski sulit dan terasa berat, apalagi sering dalam memilih orang sebagai kepercayaan malah berbalik

¹ Demokrais dan Loyalitas, Harian Kompas, 30 Maret 1996

² Etika, Keterbukaan, dan Globalisasi, Harian KOMPAS, 30 Maret 1996

mengkhianati. Meski Sukarno sebagai seorang pemimpin pun banyak kekurangan dan kelemahan, namun ia menjadi sosok yang menginspirasi bagi setiap insan untuk memiliki integritas. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memimpin sehingga di dalam dirinya muncul karakter yang beretika, memiliki loyalitas dan integritas.

Di penghujung usia ada banyak keksaksian dari orang-orang terdekat Sukarno dari dokter pribadi hingga keluarga dekat yang pada saat ini memberi bukti tentang wafatnya Sukarno. Para ahli sejarah mencoba menelusuri jejak para saksi, namun semakin tua seseorang, ingatannya semakin berkurang, dan semakin banyak yang dilupakan. Bahkan dari narasumber ada upaya untuk menolak mengisahkan kembali peristiwa dramatik yang dilaporkan mereka ketika baru dibebaskan atau karena takut akan hukum para saksi ini bungkam. Harus dengan pendekatan dan wawancara beberapa kali hingga bisa menemukan peristiwa mendalam tentang wafatnya Presiden Sukarno.

MASA TRANSISI PENUH GEJOLAK

Pada 11 Maret 1966, Presiden Sukarno dipaksa mendelegasikan kekuasaan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Jenderal Suharto. Seperti halnya misteri Gerakan 30 September, Supersemar juga sulit dibuktikan kebenarannya. Naskah aslinya sendiri “lenyap”. Berbekal Supersemar, Suharto membubarkan PKI untuk mengisolasi Presiden Sukarno. Otomatis dengan peristiwa tersebut PKI beserta *underbow*-nya lumpuh dan tentara bertekad menjalankan caranya sendiri. Sukarno menyadari bahwa ucapan-ucapannya tentang PKI dan lain-lain sudah tidak dipedulikan. Sukarno masih bisa mempertahankan kepemimpinannya dalam penampilan, tetapi kekuasaannya telah lolos

dari tangannya. Ia tak dapat lagi menekan pengaruh pribadinya kepada orang lain.³

Sukarno semakin terpojok ketika MPRS melalui Sidang Umum MPRS 20 Juni 1966-5 Juli 1966 secara terang-terangan memojokkan Sukarno. Pada 21 Juni 1966, dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MPRS Jenderal AH Nasuion, serta Wakil Ketua MPRS Osa Maliki, HM Subchan ZE, dan Mashudi, MPRS menyetujui dan memperkuat Surat Peintah 11 Maret 1966 menjadi Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966.⁴ Dalam SI MPRS yang digelar kemudian Jenderal Suharto sebagai Panglima KOPKAMTIB memberikan laporan sejauh mana keterlibatan Sukarno dalam Gerakan 30 September.

PEMBELAAN DARI PARA SAHABAT

Sesungguhnya masih banyak rakyat yang berdiri dan siap membela Presiden Sukarno hingga darah penghabisan. Bahkan Komandan Korps Kimando (KKO), Mayor Jenderal Hartono secara terbuka menyatakan siap membela Presiden Sukarno dengan mengucapkan kalimat, “Hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO; Putih kata Bung Karno, putih kata KKO.” Brawijaya di Jawa Timur pun mengajak Soekano untuk bergabung di sana. Presiden Sukarno memilih untuk “tenggelam” atau “hilang” daripada tetap muncul dan mempertahankan kekuasaannya. Jika Sukarno memutuskan untuk maju selangkah, maka akan meletus perang saudara. Ia tak mau menghancurkan persatuan bangsa yang sudah diperjuangkan sejak masa mudanya.

Kepada sahabatnya Roeslan Abdulgani, Sukarno mengatakan,

³ John D Legge , *Sukarno. Sebuah Biografi Politik*. Jakarta, Sinar Harapn, 1986, hal:459

⁴ Peter Kasenda, *Hari-Hari Terakhir Sukarno*, Jakarta, Komunitas Bambu, 2013, hal: 17

“Sekali lagi Cak, relakan saya tenggelam. Asal jangan bangsa ini dirobek-robek Nekolim dan kaki tanganya.” Akhirnya ketukan palu ketua MPRS Jenderal AH Nasution jatuh pada Minggu, 12 Maret pukul 13:30 meneteapkan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, Sukarno dicopot kekuasaan secara eksekutif. Salah satu isi TAP MPRS itu mengangkat Jenderal Suharto, sebagai Pejabat Presiden menggantikan Soekano.⁵ Dalam surat keputusan yang terdiri dari 3 bab dan 7 pasal tersebut dinyatakan:

Pertama, Presiden Sukarno telah tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban konstitusional, sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara, sebagaimana yang memberikan mandate yang diatur dalam UUD 1945.

Kedua, bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat menjalankan haluan putusan MPRS sebagai mana layaknya seorang Mandataris MPRS sebagai yang memberikan mandat yang diatur dalam UUD 1945.

Ketiga, ketetapan tersebut melarang Presiden melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum dan sejak berlakunya ketetapan Sementara dari Presiden Sokarno serta segala kekuasaan pemerintah Negara yang diatur dalam UUD 1945.

Keempat mengangkat Jenderal Suharto, Pengemban Ketetapan MPRS(s) No IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 hingga terpilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara melalui Pemilihan Umum

Kelima, Pejabat Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

Kesaksian lain tentang peristiwa penandatanganan Surat Perintah 1 Maret 1966 disampaikan oleh Hartini:

Ketika akan menekan SP 1 Maret, Bapak tanya ke Pak Leimena (Dr.) J. Leimena, Wakil Perdana Menteri II Kabinet Dwikora, 1964). “What do you think about this?” Leimena bilang, “No comment”. Adapun Soebandrio (Wakil Perdana Menteri I Kabinet Dwikora 1964) mencegah Bapak bingung. Dia kemudian Sembahyang. Setelah itu, dia tanda tangan . Jika tidak, habislah rakyat Indonesia dibantai. Maka, Bapak teken saja surat itu.⁶

⁵ Arifin Suryo Nugroho, *Srihana-Srihani Biografi Hartini Sukarno*, Yogyakarta, Yogyakarta, Ombak, 2010, hal: 192-193

⁶ Reni Nurhayati, dkk. *Istri-istri Sukarno*. Yogyakarta, Ombak, 2007, hal 70

Ku Titipkan Bangsa dan Negara ini (Brigida Intan)

Sesungguhnya Sukarno telah mencium adanya bahaya sehingga mempercepat rapat lebih lanjut dengan pimpinan ABRI. Pada akhir April, Sukarno mengganti keanggotaan DPA sesuai dengan keinginannya. Suharto menanggapi dengan mencegah terlaksananya rapat dan melanjutkan menghilangkan pengaruh PNI dari tubuh DPR dan MPRS. Sukarno membalas dengan mengancam untuk membubarkan MPRS dan tuntutan terselenggaranya pemilu, untuk sementara, bersama dengan Komisi Nasional, memerintah dengan revolusi. Angkatan Darat menolak untuk tunduk pada upaya Sukarno memegang peranan.

MPRS ketika itu memiliki 532 orang anggota mengadakan rapat mulai 20 Juni hingga 5 Juli. MPRS memutuskan untuk mengadopsi dan menyetujui kebijakan presiden yang ditetapkan dalam Surat Perintah 11 Maret 1966 dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Suharto. Pengesahan ketetapan ini menjadi tugas paling mendasar MPRS karena hal ini berarti meninggikan status Supersemar dari pelimpahan wewenang presiden. Ini yang menjadi keputusan dari badan tertinggi Negara yang tidak bisa dibatalkan oleh presiden.

Selanjutnya, pada 22 Juni, MPRS mendengarkan laporan pertanggungjawaban Sukarno yang pidatonya di bawah judul Nawaksara. Sukarno memanfaatkan kesempatan ini untuk menekankan peran kepemimpinan yang diberikan kepadanya oleh majelis. "Saya mengharap seluruh rakyat, termasuk anggota MPRS, agar selalu mengikuti, menjalankan dan melaksanakan semua yang termaktub dalam kepemimpinan saya."⁷

⁷ Peter Kasenda, *Hari-Hari Terakhir Sukarno*, Jakarta, Komunitas Bambu, 2013, hal 158

BEBERAPA HASIL CHEK UP

Hasil *general chek up* pada 30 Juli 1967 tercatat bahwa tensi Sukarno Tinggi (180-190/110-130). Hal ini disebabkan oleh ginjal kiri sudah tidak berfungsi sedangkan fungsi ginjal kanan tinggal 25%. Selain itu, juga diketahui ada penyempitan pembuluh darah jantung, pembesar otot jantung, dan gejala gagal jantung. Untuk itu, tim dokter menyarankan agar Sukarno tidak melakukan aktivitas (terutama kerja berat), pantang garam, dan membatasi kalori makanan. Dianjurkan pula agar Sukarno banyak minum air putih, minimal tiga liter sehari. Sukarno dianjurkan untuk tidak merokok, mengurangi minum kopi secara teratur dan minum obat secara teratur. Diet ini sebenarnya sudah dilakukan Sukarno, terutama kebiasaan minum kopi yang biasa dilakukan sambil membaca Koran tiap pagi. Hartini sebagai istri juga sudah memperingatkan suaminya untuk masalah ini.⁸

Sebulan kemudian tanggal 6 Agustus 1967, Sukarno kembali mengeluh. Setelah batuk-batuk keras, dada kirinya selalu terasa nyeri. Ketika diperiksa dengan rontgen, terlihat ada rusuk Sukarno yang retak (*fracture*). Dari hasil pemeriksaan juga terlihat bahwa paru-paru Sukarno mengalami *bronchi basah*. Kondisi ini masih disertai keluhan sesak napas, sedikit *asthmatische*.

Penderitaan seolah bertambah, Sukarno kerap mengeluh. Hartini merasakan benar apa yang dirasakan suaminya itu. Sukarno sendiri sering memikirkan pendidikan anak-anaknya dari Fatmawati. Kecemasan itu sempat terobati, namun pada awal Agustus 1967, seluruh keluarga Sukarno diultimatum untuk segera meninggalkan istana dalam 2x24 jam.

⁸ *Ibid*

Ku Titipkan Bangsa dan Negara ini (Brigida Intan)

Maka Fatmawati dan anak-anak pindah ke Jalan Sriwijaya. Sedang Hartini dan Sukarno pindah di Paviliun Istana Bogor. Namun pada pertengahan Desember 1967, Sukarno mendapat perintah agar meninggalkan paviliun Istana. Ini berdasarkan keputusan yang dikirim oleh Pangdam Jaya Mayor Jenderal Amir Machmud. Sukarno harus bersiap-siap karena hanya diberi waktu dalam hitungan jam.

Sukarno sekeluarga pindah ke Batu Tulis, meski pindah ternyata tidak mengurangi sakitnya Sukarno. Jika dilihat dari catatan medis dokter pribadi Sukarno, kondisinya cenderung makin memburuk. Selain ginjal, jantung serta darah tinggi muncul diagnosis baru. Rematik Sukarno sering kambuh karena udara di Bogor sangat dingin. Juga didiagnosa ada bibit awal penyakit selaput mata atau katarak.

Pada awal 1968, keluhan Sukarno bertambah. Tak hanya sakit ginjal dan tekanan darah tinggi, ia juga mengalami keluhan lain, rasa ngilu pada gigi geligi bila minum air dingin. Mendengar itu, dokter pribadi Sukarno khawatir ginjal bisa terganggu akibat penyebaran infeksi dari penyakit gigi. Karena alasan itu, Sukarno diizinkan berobat ke dokter gigi di Jakarta. Tapi untuk terapi selanjutnya ditolak. Pangdam Jaya hanya mengizinkan Sukarno berobat di Bogor.

Dalam catatan medis juga dituliskan bahwa 10 Oktober 1968, salah seorang anggota Tim Dokter Kepresidenan menulis surat pemberitahuan kepada Presiden Suharto bahwa dari hasil pemeriksaan secara menyeluruh, ia menganggap perlu mengkonsultasikan Sukarno ke dokter spesialis, mereka menulis “Kami merasa kurang mampu mengatasinya”.

Pada tanggal 20 Oktober 1968, M. Panggabean sebagai

Pangkokamtib membentuk tim dokter yang bertugas memeriksa dan merawat Sukarno. Tim itu diketuai oleh Prof. Dr. Mahar Mardjono dengan wakil Mayor Jenderal TNI dr Rubiono Kertapati. Tim ini beranggotakan Brigadir Jenderal dr. Djaka S., dr. Soekaman, dr. Oei Bing Tay, Mayor TNI dr. Suroyo dan Prof dr. Utama. Dalam menjalankan tugas, tim dokter harus berhubungan dengan Pangdam Jaya selaku Laksus Pangkokamtib Jaya. Pada tanggal 29 Oktober 1968, Pangdam Jaya menulis surat yang isinya memutuskan agar para dokter sneantiasa berhubungan dengan Mayor Jenderal TNI dr Rubiono dan Brigadir Jenderal TNI dr. Hassan.

Dalam berkas catatan kesehatan Sukarno juga ditemukan sejumlah undangan pertemuan antara para dokter dan Brigadir Jenderal dr Hassan serta Mayor Jenderal dr. Rubiono di sejumlah tempat. Misalnya, pada 1,4, dan 6 November 1968, dan pada 31 Januari dan 11 Februari 1969, antara lain di rumah salah seorang dokter atau RSPAD. Pertemuan tersebut membahas perihal pengobatan dan perawatan Sukarno serta penyusunan laporan mengenai kesehatan Sukarno. Pada salah satu undangan pertemuan yang ditulis di kertas resep Brigjen dr. Hassan minta agar para dokter bekerjasama dengan Letda CPM Suwarjo dalam hal makanan dan lain-lain yang diberikan kepada Sukarno. Mengenai Suster yang merawat Sukarno, dalam surat itu dr. Hassan minta agar para dokter mematuhi pengarahannya Mayor Jenderal dr. Roebiono.

Penyakit yang bertambah parah sehingga pada 1969 Sukarno dipindahkan ke rumah Wisma Yaso. Sukarno terus menjalani pemeriksaan Kopkamtib untuk mengetahui sejauh mana keterlibatannya dalam Gerakan 30 September. Secara otomatis Sukarno terpisah dari istri-istri dan anak-anaknya.

Ku Titipkan Bangsa dan Negara ini (Brigida Intan)

Penahanan sebenarnya bukanlah sesuatu yang telalu mengejutkan Sukarno. Di masa Hindia Belanda, Sukarno pernah mengalaminya. Namun, sekarang masalahnya berbeda. Tubuh Sukarno sudah ringkih, ia mengalami komplikasi penyakit sehingga harus meminum demikian banyak obat. Disamping itu, penahanan tidak tepat jika melihat kesehatannya tersebut. Di Wisma Yaso yang memang rumahnya sendiri, Sukarno tidak merasakan kebahagiaan karena tidak ada teman yang diajak bicara. Anak-anak Sukarno hanya diizinkan menjenguk dengan waktu yang terbatas. Pembicaraan dan tingkah laku setiap orang yang menjenguk diawasi penjaga dengan ketat. Sukarno mengalami kemunduran dan kesepian yang mengikis habis seluruh semangat hidupnya.⁹

Lepas dari penyakit ginjalnya, menurut Maryono pada 1969 keadaan fisik Sukarno cukup baik. Sukarno sebagai penderita penyakit ginjal tetap menolak dioperasi. Maryono dan Fatmawati memohon kepada Presiden Suharto untuk tidak begitu ketat menginterogasi Sukarno, dan permohonan itu ditanggihkan. Awal tahun 1970 diangkat seorang komandan baru untuk detasemen pengawal di Wisma Yaso, yaitu perwira intelejen Max den Dekker. Dengan pengawal baru ini, penjagaan lebih supel.

Meski lebih bebas, Den dekker menyaksikan betapa Sukarno makin lama makin mundur: Tanganya gemetar; sehingga senantiasa menjatuhkan barang. Tim medis menemukan bahwa tekanan darahnya begitu tinggi hingga mengkhawatirkan. Ginjal yang sudah keracunan sekarang menjadi fatal baginya. Ia tidak bisa bangkit lagi dari tempat

⁹ Yuanda Zara, *Ratna Sari Dewi Sukarno. Sakura di Tengah Prahara*. Yogyakarta, Ombak, 2008, hal 134

tidurnya, juga tidak untuk pada 6 Juni merayakan hari ulang tahunnya.¹⁰

KESAKSIAN SITI KHADIJAH SUROYO

Salah satunya ialah Suroyo yang pernah bergabung dalam pasukan PARA, Batalyon 330 Kujang I Siliwangi di Bandung. Sebelum terjun ke medan perang, ternyata Irian Barat telah berhasil direbut. Karena peristiwa itu, Suroyo ditarik ke Direktorat Kesehatan Angkatan Darat di Jakarta. Bertepatan dengan itu, Resiman Cakrabirawa (pasukan pengawal Presiden Sukarno) mencari beberapa dokter. Mereka terpilih menjadi dokter pada Resimen Cakrabirawa. Pada saat tersebut Suroyo berkenaan dengan Presiden Sukarno. Selain menjaga kesehatan pasukan, para dokter juga ikut mengawal Presiden Sukarno saat bepergian. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu secara bergantian mereka bersama ajudan Presiden pergi ke Istana Bogor dengan naik dua helikopter. Heli pertama ditumpangi oleh Presiden Sukarno, yang kedua oleh dokternya.¹¹

Suroyo pernah bercerita, suatu malam ada pertunjukan wayang di Istana Bogor, padahal ketika itu Presiden Sukarno sedang sakit panas. Dikhawatirkan, apabila ketahuan sakit, dunia akan geger. Untungnya, ia kuat menonton sampai pagi tanpa terjadi sesau. Oktober 1965 Presiden Sukarno berencana ke Timur Tengah, khususnya Aljazair. Pada saat itu Suroyo mendapat giliran mendampingi. Untuk pengamanan, bersama pasukan Intel Cakrabirawa ia berangkat mendahului rombongan presiden, pada 29 September 1965. Namun, pada saat itu bertepatan dengan pecah peristiwa G30S/PKI mengakibatkan Presiden batal berangkat.

¹⁰ Lambert J. Giebels, *Pembantaian yang Ditutup-tutupi. Peristiwa Fatal di Sekitar Kejatuhan Bung Karno*. Jakarta, Grasindo, 2001, hal 239-242

¹¹ *Kalu Saja... Bung Karno Pasti Panjang Umur*, Intisari, Maret 2002, hal 162

Ku Titipkan Bangsa dan Negara ini (Brigida Intan)

Pasca peristiwa G30S/PKI, Suroyo menghilang. Saat itu, pasukan Cakrabirawa sedang diperiksa karena diketahui bahwa banyak anggotanya yang terlibat peristiwa G30S/PKI. Banyak teman Suroyo datang menanyakan keberadaannya. Usai peristiwa G30S/PKI, Resimen Cakrabirawa dibubarkan. Anggotanya tidak terlibat peristiwa itu, termasuk Suroyo, diperintahkan untuk membantu para korban banjir meluapnya Bengawan Solo.

MASUK TIM DOKTER PRIBADI

Sekitar September 1966, sekembali dari Jakarta dari tugas di Solo, ia mendapat perintah menjadi salah satu tim dokter pribadi Presiden Sukarno. Ada dua Surat Perintah. Yang pertama dari Presiden, yang satu dari Suharto selaku MenPangad. Suroyo tidak dapat menolak. Sejak itu Suroyo menanggalkan baju hijau, berganti baju dokter. Setiap pagi Suroyo bertugas memeriksa kesehatan Presiden Sukarno di samping juga memegang Poliklinik Istana Bogor. Selain Suroyo ada beberapa dokter lain, diantaranya dokter tentara, dokter spesialis sipil. Suroyo, dokter termuda dalam tim, mengkoordinasi dan wajib mendampingi bila ada dokter lain yang akan memeriksa Presiden. Presiden Sukarno tidak tahan karena terpisah dari dunia yang selama ini digeluti. Di dalam Istana ia diperlakukan seperti tahanan. Menurut Soeryo, kesehatan Presiden terus menurun, maka ia dipindahkan ke Wisma Yaso di Jakarta.

Suroyo sering mengeluh karena tim dokter spesialis sering enggan datang ke Bogor ataupun Wisma Yaso. Ada berbagai alasan yang menekan para tim dokter spesialis, salah satunya takut diintimidasi. Ketika itu siapa pun yang sering datang mengunjungi Sang Proklamator, pasti dicurigai dan ditanyai macam-macam, seolah-olah Presiden

membawa penyakit menular.

Presiden Sukarno tidak pernah terkena sakit stroke seperti pemimpin Negara lain, namun mungkin perawatan lebih terjamin dibandingkan Sang Proklamator. Ketika Suroyo meminta alat pencuci darah, sampai si pasien wafat alat itu tak kunjung tiba. Untuk memeriksa dara Presiden Sukarno, Suroyo sering hanya menggunakan laboratorium kecil milik Institut Pertanian Bogor. Itupun masih dengan menyamarkan nama Presiden Sukarno.

INGATAN SOEBRANDIO, KEPALA BPI

Salah satu sejarawan Asvi Marwan Adam melakukan wawancara dengan seorang tokoh bangsa berusia 86 tahun. Soebrandio, orang yang pernah menjabat Waperdam I, Menteri Luar Negeri dan Kepala BPI (Badan Pusat Intelejen). Tetapi sebagai seorang tua jelas ingatan Soebrandio tidak sebagus dulu lagi.

Di dalam kesaksian tahun 2000 Soebrandio mengatakan bahwa salah satu dokter yang memeriksa Sukarno adalah dokter keturunan Tionghoa dari Kebayoran Baru. Dalam persidangan Mahmillub, Soebrandio mengakui tentang keberadaan dokter RRC tersebut. Ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Dr. Mahar Mardjono. Pada tanggal 4 Agustus 1965, Mahar Mardjono yang sedang praktek di RS. St. Carolus dijemput oleh Mayor Dr. Darjono (Cakrabirawa) ke Istana Merdeka. Presiden Sukarno muntah-muntah, pusing dan tidak bisa berdiri karena sempoyongan. Saksi melihat ada dua dokter RRC di Istana merdeka.

Tanggal 8 Agustus 1965, saksi (Mahar) melihat D.N Aidit di Istana Merdeka dan masuk keruangan tempat Sang Proklamator diperiksa. Saat itu saksi sedang memeriksa kesehatan presiden dengan dua neurology

Ku Titipkan Bangsa dan Negara ini (Brigida Intan)

dari RRC. Aidit bertanya bagaimana kesehatan Presiden. Dijawab Mahar “baik”.

Menurut Soebandrio dalam persidangan, penyakit presiden sebetulnya tidak serius, tapi masalahnya tidak mau dioperasi. Oleh sebab itu para dokter RRC itu melakukan pengobatan dengan ramuan tradisional untuk menghancurkan batu ginjal. Para dokter itu datang secara rutin ke Jakarta, dua kali dalam setahun.

KESAKSIAN MEUTIA HATTA

Pada bulan Juni 1970, Sukarno dikabarkan telah sakit keras dan tak sadarkan diri. Sekertaris Presiden Suharto, Letjen Tjokropranolo (mantan Gubernur DKI), datang menjemput Hatta. Sleanjutnya mereka ke RSPAD, untuk menjenguk Sukarno. Hatta bersama Wangsa Widjaja (Sekertaris Hatta), Meutia (putri sulung Hatta), dan Gemala (putri kedua Hatta). Mereka semua menunggu di kamar Sukarno. Namun, perawat mengatakan bahwa Sukarno tak sadarkan diri. Wajahnya terlihat membengkak dan pucat. Wangsa Widjaja mengajak Hatta dan kedua anaknya untuk pulang. Dengan berat hati Hatta bersama rombongan bergerak melangkah keluar. Tetapi tiba-tiba Sukarno siuman. Tangannya seperti menggapai-gapai, sambil menunjuk sesuatu di atas kepalanya. Artinya bahwa Sukarno meminta perawat mengambilkan kacamata untuknya. Setelah kacamata itu dipasang, Sukarno melmbai seakan meminta Hatta mendekat.

Meutia Hatta menuturkan, Sukarno mengucapkan kalimat yang sulit ditangkap, apalagi dalam bahasa Belanda, “*Hoe gaat het met jou?*’Apa kabar?’. Sukarno menitikkan air mata, menetes ke bantal. Ia memandang Hatta, yang terus memijit lengan Sukarno. Hatta hanya

berkata kepada Sukarno, “Ya, sudahlah. Kuatkan hatimu, tawakal saja pada Allah, Saya doakan agar lekas sembuh.”¹²

Kemudian Sukarno menghembuskan nafas terakhirnya. Peristiwa mengharukan itu mengingatkan pada peristiwa 25 tahun sebelumnya. Yaitu saat keduanya beriringan bersama dari kamar tidur Sukarno, menuju halaman depan Pegangsaan Timur, untuk mengumandangkan kemerdekaan Indonesia. Hatta menggenggam tangan Sukarno tanpa berkata-kata. Hatta merasa sedih memikirkan betapa kejamnya sekelompok masyarakat yang tega memasungnya. Tragis dan ironis. Dua hari setelah pertemuan kedua Proklamator itu, di hari Minggu pagi 21 Juni 1970, Sukarno wafat.¹³ Sukarno memegang tangan dokternya Mahar Mardjono sebelum menghembuskan napas terakhir. Detik-detik terakhir menjelang wafatnya semua putra-putri Sukarno dari Fatmawati hadir, hanya Ratna Sari Dewi istri satu-satunya yang hadir ketika itu. Putrinya, Kartika Sarina (Karina) yang masih berusia tiga tahun juga ikut. Sukarno sendiri tidak sempat melihat putrid kecilnya itu.

Lokasi makam Sokearno ditentukan oleh Suharto, yaitu di Blitar, dengan alasan telah membicarakannya dengan Hatta. Permintaan keluarga agar Sukarno dimakamkan di Batu Tulis, tidak disetujui Suharto. Dalam surat wasiatnya tahun 1965, Sukarno menginginkan dimakamkan di Kebun Raya Bogor. Namun hal tersebut ditolak oleh Suharto. Blitar ditentukan oleh Suharto dengan alasan ibunda Sukarno, Ida Ayu, juga dimakamkan di Blitar.

¹² Widjaja Wangsa I, *Mengenang Bung Hatta*. Jakarta, Gramedia, 1988, hal 145

¹³ Peter Kasenda, *Sukarno Hatta Bukan Proklamator Paksaan*. Yogyakarta: GalangPress, 2015, hal 596

KESAKSIAN DARI DOKUMEN MILIK SUAMI SITI KHADIJAH SUROYO

Pengalaman menarik terjadi saat presiden ingin menghadiri pernikahan salah seorang putrinya. Ironisnya, tidak ada orang yang mau mengantar jemput, padahal kesehatannya semakin memburuk. Karena memaksakan diri untuk hadir, Presiden Sukarno pun pergi dengan naik mobi Suroyo ke pernikahan itu.

Sepulang pernikahan itu, keadaan Sukarno semakin parah dan harus dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Selama beberapa hari Sukarno tidak pulang. Ketika pulang, ia mengatakan kondisi Sukarno makin parah, dan dalam keadaan tidak sadar. Ratna Sari Dewi dan keluarganya berkumpul di dekatnya. Keesokan harinya ketika Suroyo kembali ke RS, Presiden Sukarno telah wafat. Jenazahnya dibawa ke Wisma Yaso. Karena dilarang melayat ke Wisma Yaso, Suroyo pun pulang.

Singkatnya setelah Sukarno meninggal, Suroyo pun menyusul pada bulan April 1997 setelah terserang stroke. Beberapa bulan istri Suroyo membersihkan rak bukunya. Ternyata secara tidak sengaja ditemukan dua map berisi dokumen kesehatan Presiden Sukarno dan Sembilan buku catatan harian semasa presiden dirawat di Wisma Yaso. Warna dokumen itu sudah kuning, karena tersimpan selama 27 tahun. Mungkin setelah wafat Suroyo bingung harus diserahkan pada siapa dokumen itu.

Dalam dokumen itu ada catatan kesehatan presiden sejak 1966, hasil-hasil laboratorium, hasil ECG, hasil pemeriksaan gigi, mata, dll. Adapula sejumlah surat izin dari Panglima Siliwangi, surat permohonan Ibu Hartini kepada Pak Harto agar presiden diijinkan dirawat di Wisma Yaso. Dari buku-buku catatan harian suster, bahwa tindakan medis yang

diberikan sangatlah lengkap.

Dalam siaran TV selama masa pemerintahan Suharto, sempat Ratna Sari Dewi berkata dalam wawancara dalam salah satu siaran TV, bahwa meninggalnya Sukarno karena “diracun”. Sesungguhnya tidak sesuai dengan yang ditemukan dari kesaksian dokumen yang ditemukan. Akhirnya dokumen diserahkan pada Rachmawati di rumahnya.¹⁴

Bapak Bangsa adalah wajah bangsa. Jika suatu bangsa mengerdilkan peran Pendiri Bangsa-nya, sendiri, maka ini merupakan cerminan kualitas bangsa itu sendiri di mata dunia. Negara RI diproklamasikan bukan karena paksaan.¹⁵ Dengan jiwa revolusioner kita bangun Negara ini agar pesan “*Founding Father*” kita “ Kutitipkan Bangsa dan Negara ini kepadamu” lejang oleh arus zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Giebels, Lambert J. 2005. *Pembantaian yang Ditutup-tutupi. Peristiwa Fatal di Sekitar Kejatuhan Bung Karno*. Jakarta: Grasindo
- Kasenda, Peter. 2013. *Hari-Hari Terakhir Sukarno*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Legge, John D. 1985. *Sukarno. Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: Sinar Harapn.
- Nugroho, Arifin Suryo. 2009. *Srihana-Srihani Biografi Hartini Sukarno*, Yogyakarta: Ombak. Fatmawati Sokearno. 2010. *The First Lady*. Yogyakarta: Ombak
- Nurhayati, Reni dkk. 2007. *Istri-istri Sukarno*. Yogyakarta: Ombak

¹⁴ *Kalu Saja... Bung Karno Pasti Panjang Umur*, Intisari, Maret 2002, hal 165

¹⁵ *Ibid*, hal 599

Ku Titipkan Bangsa dan Negara ini (Brigida Intan)

Wangsa I, Widjaja. 1988. *Mengenang Bung Hatta*. Jakarta: Gramedia

Zara, M Yuanda. 2008. Ratna Sari Dewi Sukarno. *Sakura di Tengah Prahara*. Yogyakarta: Ombak.

Sumber Media Cetak

Demokrais dan Loyalitas, Harian Kompas, 30 Maret 1996

Etika, Keterbukaan, dan Globalisasi, Harian KOMPAS, 30 Maret 1996

Kalu Saja... Bung Karno Pasti Panjang Umur, Intisari, Maret 2002
